

JURNAL KEBIJAKAN & PELAYANAN PUBLIK

Volume 13, Nomor 1, Februari 2025

P-ISSN: 339-0999, E-ISSN: 2723-7575

Website: <https://ojs-untikaluwuk.ac.id/index.php/fisip>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

KINERJA APARAT DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA OLUSI KECAMATAN BUKO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Budianto Taib¹, Ni Luh Titi Indayani²

Ilmu Administrasi Negara, Universitas Tompotika Luwuk

Email : taibbudianto80@gmail.com, niluhyani48@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja aparat Desa Olusi Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kajian difokuskan pada indikator kinerja menurut Robbins, yaitu kualitas kerja, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling, melibatkan 8 informan yang terdiri dari Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat. Denan menggunakan teknik *Snowball Sampling*. pegambilan data digunakan dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang kemudian dianalisis melalui tiga alur kegiatan yaitu reduksi data (*reduction*), penyajian data (*display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing* atau *verification*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparat Desa Olusi tergolong baik pada aspek kualitas, kuantitas, efektivitas, dan kemandirian, meskipun indikator ketepatan waktu masih menjadi kelemahan yang cukup menonjol. Keterlambatan pelayanan administrasi dan pelaporan disebabkan oleh keterbatasan fasilitas, kurangnya sumber daya manusia, serta koordinasi eksternal yang belum optimal. Secara umum, aparat desa telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip *good governance* melalui pelayanan yang cukup responsif, transparan, dan akuntabel. Namun, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, manajemen waktu yang lebih efektif, serta optimalisasi sarana prasarana untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: Kinerja, Aparat Desa, Pemerintahan

Abstract

This study aims to analyze the performance of the Olusi Village apparatus in Buko District, Banggai Kepulauan Regency, in administering village governance. The study focuses on performance indicators according to Robbins, namely work quality, quantity, timeliness, effectiveness, and independence. The method used is descriptive qualitative with purposive sampling technique, involving 8 informants consisting of the Village Head, village officials, Village Consultative Body (BPD), and the community. Snowball

sampling technique is used. Data collection was carried out through in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis in this study used the Miles and Huberman model, which was then analyzed through three stages: data reduction, data display, and conclusion drawing or verification. The results of the study show that the performance of the Olusi Village apparatus is relatively good in terms of quality, quantity, effectiveness, and independence, although the indicator of timeliness is still a significant weakness. Delays in administrative services and reporting are caused by limited facilities, a lack of human resources, and suboptimal external coordination. In general, village officials have made efforts to implement the principles of good governance through services that are responsive, transparent, and accountable. However, improvements are needed in human resource capacity, more effective time management, and optimization of infrastructure to achieve a more professional village governance system that is oriented towards the needs of the community.

Keywords: Performance, Village Officials, Government

Pendahuluan

Desa Olusi, yang merupakan bagian dari wilayah pemerintahan Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan, merupakan desa yang memiliki kewajiban untuk menjalankan seluruh proses pemerintahan desa secara baik, bertanggung jawab, dan berorientasi kepada masyarakat. Desa atau udik, menurut definisi “universal” adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sejak diberlakukannya otonomi daerah istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah nigari, di Aceh dengan istilah gampong, di Papua, Kutai Barat dan Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampong. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.

Dapat disimpulkan bahwa perangkat pemerintah desa yang bertugas di Kantor Desa Olusi masih menghadapi banyak kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan desa yang baik. Menurut kamus Wikipedia Bahasa Indonesia Pemerintah secara etimologi berasal dari kata “perintah”, yang berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Definisi dari Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu masyarakat yang memiliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik. Begitupun dengan keberadaan pemerintahan desa yang telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.

Pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas yang disebut regering atau government, yakni pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang diserahi wewenang mencapai tujuan negara, Alam Syafie (2011:20).

Pemerintahan dapat dipahami melalui dua pengertian; disatu pihak dalam arti “fungsi pemerintahan” (kegiatan memerintah), di lain pihak dalam arti “organisasi pemerintahan” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan), Hadjon (2008:270). Fungsi pemerintahan ini secara keseluruhan terdiri dari berbagai

macam tindakan-tindakan pemerintahan; keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan-tindakan nyata. Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu.

Kinerja aparat desa dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Secara internal, kompetensi individu, termasuk pendidikan, pengalaman kerja, dan keterampilan teknis, menjadi faktor utama dalam menentukan efektivitas kerja. Selain itu, motivasi kerja yang dipengaruhi oleh sistem penghargaan, kondisi kerja, serta kepemimpinan kepala desa juga turut menentukan semangat dan dedikasi aparat desa dalam menjalankan tugas. Lingkungan kerja yang kondusif, hubungan antarpegawai yang harmonis, dan tersedianya fasilitas pendukung turut memperkuat kinerja aparat desa dalam memberikan pelayanan publik.

Kinerja sebagai berikut: “performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during time period”. Prestasi atau kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu, (Bernardin dan Russeldalam Ruky 2002:15). Kinerja adalah penampilan hasil kerja personil maupun dalam 4 suatu organisasi, (Ilyas 1999:99).

Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personil yang memangku jabatan fungsional maupun struktural tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personil di dalam organisasi. Pengukuran kinerja pegawai penting dilakukan oleh instansi pemerintah baik itu instansi pemerintah pusat sampai ke daerah. Dengan mengetahui kelemahan dan kelebihan, hambatan dan dorongan, atau berbagai faktor sukses bagi kinerja pegawai serta institusi maka terbukalah jalan menuju profesionalisasi, yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan selama ini. Terdapat berbagai teori mengenai indikator kinerja pegawai.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pegawai yaitu:a.Pemahaman atas tupoksiDalam menjalankan tupoksi, bawahan harus terlebih dahulu paham tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing serta mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang menjadi tanggungjawabnya.b.InovasiMemiliki inovasi yang positif menyampaikan pada atasan serta mendiskusikannya pada rekan kerja tentang pekerjaan.c.Kecepatan kerjaDalam menjalankan tugas kecepatan kerja harus diperhatikan dengan menggunakan mengikuti metode kerja yang ada.d.Keakuratan kerjaTidak hanya cepat, namun dalam menyelesaikan tugas karyawan juga harus disiplin dalam mengerjakan tugas dengan teliti dalam bekerja dan melakukan pengecekan ulang.e.KerjasamaKemampuan dalam bekerjasama dengan rekan kerja lainnya seperti bisa menerima dan menghargai pendapat orang lain, (Muhammad 2009:195).

Indikator kinerja pegawai meliputi:a.Produktivitas kerja yang memiliki ukuran pokok diantaranya:1.Sikap pegawai, dimana dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dapat dilihat melalui kesediaan para pegawai untuk bekerja secara efektif dan efisien.2.Kemampuan, dimana aparatur memiliki skill dalam melaksanakan tanggungjawab pekerjaannya.3.Semangat kerja, yang dapat diartikan sebagai sikap mental para pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dimana sikap mental ini ditunjukkan oleh adanya kegairahan dalam melaksanakan tugas.b.Kualitas layanan dilihat dari tingkat kesalahan, kerusakan, dan kecermatan dalam melaksanakan tugas.c.Responsivitas adalah kemampuan aparat untuk menggali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas

pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.d.Responsibilitas adalah pelaksanaan kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.e.Akuntabilitas menunjukkan seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak, (Pasolong 2006:50-51).

Pemaparan dari beberapa teori diatas dan membandingkan kondisi lapangan maka penelitian ini akan menggunakan teori untuk mengukur kinerja pegawai, yakni Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas. Hal ini dikarenakan unsur-unsur yang terkandung dalam indikator ini dianggap mampu menggambarkan kinerja aparat Desa Tinompo secara maksimal.

Kata “aparat” sering diartikan sebagai pegawai negeri atau pegawai negara.Padahal arti kata itu lebih luas sebab menyangkut seperangkat sistem yang digunakan oleh penguasa/pemerintah untuk mengelola kekuasaannya atau semua perangkat yang digunakan oleh pemerintah untuk menerapkan kekuasaan pada masyarakat.Oleh karena itu, seandainya aparat diartikan sebagai pegawai sekalipun maka tidak hanya meliputi pegawai yang berstatus pegawai negeri melainkan pegawai yang bukan pegawai negeri juga sepanjang terlibat dalam kegiatan pemerintahan.Aparatur adalah orang-orang yang menjalankan roda pemerintahan.

Aparatur memiliki peranan strategis dalam menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.Peranan aparat tersebut sesuai dengan tuntutan zaman terutama untuk menjawab tantangan masa depan. Aparatur yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam rangka menghadapi tantangan masa depan.

“Aparat pemerintah adalah pekerja yang digaji pemerintah melaksanakan tugas-tugas teknis pemerintahan melakukan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku”. Pengertian tersebut mengenai aparat adalah sumberdaya manusia yang bekerja sesuai dengan kemampuannya, di bidangnya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang ada.Berkewajiban dalam melayani setiap warga Negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya, (Salam2004:169).

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti terhadap kinerja perangkat desa Olusi, ditemukan sejumlah permasalahan yang muncul akibat kurang optimalnya kinerja perangkat desa. Permasalahan tersebut antara lain meliputi rendahnya respons perangkat desa terhadap aspirasi masyarakat Olusi, keterbatasan kemampuan dalam memberikan pelayanan yang sesuai harapan masyarakat, serta ketidakmampuan dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Temuan awal ini mencerminkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangan dalam upaya optimalisasi kinerja perangkat desa Olusi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kinerja aparat desa Olusi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk mengarahkan pengumpulan, pengolahan dan analisis data penelitian ini maka penelitian ini difokuskan pada kinerja aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Olusi Kecamatan Buko Kabupaten Banggak Kepulauan. Ditinjau dari dimensi Kemampuan (ability), motivasi (motivation), kesempatan (opportunity). Informan dalam penelitian ini berjumlah delapan orang. Terdiri dari lima orang pemerintah desa yakni: Kepala Desa, Sekretaris

Desa merangkap Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, BPD, dan tiga orang warga masyarakat Desa Olusi Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan.

Metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat selama proses penelitian. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246) mengungkapkan bahwa dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan dan seringkali menjadi objek penelitian. Lokasi penelitian berada di Kantor Desa Olusi Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan. Berdasarkan judul penelitian, maka subjek dalam penelitian ini adalah perangkat desa sedangkan objek dalam penelitian adalah kinerja aparat desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan regulasi pemerintahan desa.

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan peran dan keterlibatan mereka dalam pemerintahan desa. Informan utama dalam penelitian ini meliputi: Kepala Desa Olusi sebagai pemimpin pemerintahan desa; Sekretaris Desa merangkap Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas kinerja aparat desa; dan masyarakat setempat yang memiliki pengalaman dan wawasan terhadap kinerja aparat desa. Upaya untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian, instrumen utama yang mengambil bagian penting didalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (key instrument), karena peneliti sendiri yang memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data (wawancara dan telaah dokumen), kemudian menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan model Miles dan Huberman (1984) dalam Idrus (Mahmud, 2016) yang mengemukakan bahwa dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya menjadi jenuh.

Hasil dan Pembahasan

Konseptual mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) telah dimiliki oleh aparat desa. Artinya, secara kelembagaan, struktur kerja sudah berjalan dengan baik, karena setiap perangkat mampu mengidentifikasi peran yang harus dijalankan. Namun, pemahaman tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan keterampilan teknis yang memadai untuk mengatasi permasalahan administratif. Hal ini menegaskan adanya kesenjangan antara pengetahuan normatif dan kemampuan praktis. Kendala teknis yang disebutkan, seperti pengelolaan administrasi, mencerminkan masih terbatasnya fasilitas kerja yang tersedia. Misalnya, peralatan kantor yang tidak lengkap atau sistem administrasi digital yang belum terintegrasi dapat menghambat produktivitas. Keterbatasan ini mengarah pada perlunya intervensi kebijakan berupa peningkatan infrastruktur dan pelatihan teknis yang relevan agar aparat desa dapat bekerja lebih efisien.

Selain itu, latar belakang pendidikan perangkat desa menjadi faktor penentu dalam efektivitas pelaksanaan tugas. Aparat dengan pendidikan terbatas cenderung menghadapi kesulitan dalam memahami prosedur administratif yang kompleks. Maka, pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia menjadi solusi penting agar kualitas pelayanan publik meningkat seiring dengan tuntutan masyarakat yang

semakin tinggi. perbaikan kinerja aparat desa tidak hanya membutuhkan komitmen individu, tetapi juga dukungan struktural berupa penyediaan fasilitas, peningkatan kapasitas melalui pelatihan, dan penyesuaian sistem kerja agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi administrasi.

Sebagian besar pekerjaan harian desa sudah berjalan sesuai jadwal, menunjukkan adanya efektivitas dalam pelaksanaan pelayanan dasar. Hal ini mencerminkan profesionalisme aparat dalam mengelola administrasi sehari-hari. Namun, muncul persoalan terkait keterlambatan penyampaian laporan yang bukan sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah desa, melainkan dipengaruhi oleh ketergantungan pada instansi lain.

Masalah keterlambatan ini merupakan cerminan dari tantangan koordinasi antar lembaga pemerintahan. Dalam praktik administrasi publik, sinergi antarlevel birokrasi merupakan hal yang sangat penting. Jika alur komunikasi antarinstansi tidak lancar, maka meskipun aparat desa bekerja optimal, hasil akhirnya tetap terhambat. Kondisi ini memperlihatkan adanya faktor eksternal yang mengganggu ketepatan waktu dalam pelayanan.

Selain itu, keterlambatan penyampaian laporan dapat berdampak pada proses perencanaan dan evaluasi program desa. Laporan yang terlambat akan menghambat proses pengambilan keputusan pada tingkat kecamatan atau kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan sistem koordinasi, misalnya melalui digitalisasi data dan sinkronisasi aplikasi antarinstansi, sangat dibutuhkan untuk meminimalkan keterlambatan.

Efektivitas kinerja desa tidak bisa dilepaskan dari keterhubungannya dengan instansi di atasnya. Oleh karena itu, penguatan sistem koordinasi dan pengelolaan data secara terpadu harus menjadi prioritas agar rantai birokrasi dapat berjalan lebih efisien. Konsistensi pemerintah desa dalam menjalankan program sesuai dengan dokumen perencanaan. Hal ini penting karena rencana kerja desa (RKPDes) merupakan instrumen yang menjamin akuntabilitas dan arah pembangunan. Dengan melaksanakan program sesuai rencana, aparat desa memperlihatkan komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Lebih lanjut, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa menjadi indikator positif bagi keberhasilan program. Partisipasi masyarakat tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan desa, tetapi juga mencerminkan tumbuhnya kesadaran kolektif untuk bersama-sama memajukan desa. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan berbasis masyarakat (*community-based development*) yang menekankan keterlibatan aktif warga.

Namun, meskipun partisipasi meningkat, masih diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih terukur. Monitoring yang baik akan memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai tujuan dan dapat diukur dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Tanpa sistem pengawasan yang ketat, terdapat risiko program hanya berjalan formalitas tanpa menghasilkan output yang signifikan. Efektivitas pembangunan desa bukan hanya ditentukan oleh adanya rencana dan pelaksanaan, tetapi juga sejauh mana program dapat diukur hasilnya. Keterlibatan masyarakat dan sistem evaluasi yang baik merupakan kunci keberlanjutan pembangunan.

Aspek pelayanan publik, khususnya terkait ketepatan waktu. Keluhan masyarakat menunjukkan bahwa meskipun program kerja desa berjalan dengan baik, pelayanan administratif sehari-hari masih menghadapi kendala. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dan kinerja aparat desa dalam memberikan

layanan.

Masalah keterlambatan pelayanan dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Secara internal, manajemen waktu dan pembagian kerja yang belum optimal dapat menyebabkan keterlambatan. Sementara itu, faktor eksternal seperti koordinasi dengan lembaga lain juga bisa memperlambat proses. Hal ini mengindikasikan bahwa perbaikan sistem kerja internal harus diiringi dengan penguatan koordinasi eksternal.

Selain itu, persepsi masyarakat mengenai lambatnya pelayanan dapat memengaruhi kepercayaan terhadap pemerintah desa. Jika masyarakat sering menghadapi keterlambatan, mereka cenderung menilai pelayanan publik kurang profesional, meskipun aspek lain seperti keramahan atau keterbukaan sudah baik. Oleh karena itu, perbaikan waktu layanan menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga citra positif desa. Indikator ketepatan waktu memiliki posisi strategis dalam menilai kualitas pelayanan publik. Desa perlu menempatkan efisiensi waktu sebagai prioritas agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat dan pelayanan desa dapat dinilai optimal. Aspek sikap pelayanan, seperti keramahan, keterbukaan, dan inisiatif aparat desa, sudah berjalan dengan baik. Hal ini merupakan modal sosial penting dalam membangun hubungan harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat. Namun, meskipun kepuasan dirasakan dari sisi sikap, masyarakat tetap menuntut perbaikan dalam hal manajemen waktu.

Harapan agar layanan dibuka tepat waktu menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap kedisiplinan aparat desa. Keterlambatan pelayanan, meskipun kecil, dapat mengganggu aktivitas masyarakat yang membutuhkan dokumen administratif secara cepat. Dengan demikian, aspek ketepatan waktu menjadi tolok ukur utama dalam menilai kualitas layanan.

Selain itu, pernyataan ini memperlihatkan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai pihak yang mampu memberikan evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa. Kritik yang disampaikan masyarakat secara konstruktif dapat dijadikan masukan untuk memperbaiki sistem pelayanan ke depan.

Hal ini menegaskan pentingnya mekanisme feedback dari masyarakat. Pelayanan desa sudah memiliki pondasi yang baik dalam aspek sikap aparat. Namun, tanpa perbaikan dalam hal kedisiplinan waktu, kepuasan masyarakat akan tetap terbatas. Oleh karena itu, peningkatan manajemen waktu dan disiplin kerja harus menjadi prioritas utama dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik desa.

1. Kualitas Kerja

Kualitas kerja aparat masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan fasilitas dan sarana kerja. Beberapa perangkat menyebutkan bahwa keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan seringkali dipicu oleh peralatan kerja yang tidak memadai, seperti komputer atau jaringan internet yang terbatas. Kondisi ini sesekali memperlambat proses pelayanan, meskipun secara umum hasil kerja tetap sesuai standar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kualitas kerja aparat desa berada pada kategori cukup baik, namun belum maksimal.

2. Kuantitas Kerja

Masih ada beberapa pekerjaan tambahan yang mengalami keterlambatan penyelesaian. Hal ini biasanya terjadi pada tugas insidental atau kegiatan yang muncul di luar rencana kerja tahunan. Keterbatasan sumber daya manusia dan beban kerja yang tinggi menjadi faktor utama penyebab keterlambatan tersebut.

Meskipun demikian, masyarakat menilai adanya peningkatan kuantitas pelayanan, terutama karena semakin aktifnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa. Oleh karena itu, indikator kuantitas cukup baik, meskipun peningkatan kapasitas sumber daya manusia masih diperlukan.

3. Ketepatan Waktu

Selain faktor eksternal, keterbatasan manajemen waktu dan pembagian tugas juga menjadi kendala dalam menjaga ketepatan waktu pelayanan. Beberapa perangkat desa mengaku kesulitan membagi waktu antara tugas rutin dengan tugas tambahan, terutama ketika ada program pembangunan yang membutuhkan perhatian intensif. Akibatnya, beberapa layanan publik mengalami keterlambatan meskipun sebenarnya perangkat desa sudah berupaya maksimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa aspek ketepatan waktu masih belum optimal dibanding indikator lainnya.

4. Efektivitas

Masyarakat juga merasakan manfaat nyata dari hasil kerja aparat desa, terutama pada aspek pembangunan fisik dan pelayanan sosial. Responden menilai bahwa keberadaan infrastruktur baru telah mempermudah aktivitas ekonomi, sedangkan penyaluran bantuan sosial meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan. Efektivitas yang ditunjukkan aparat desa tidak hanya berdampak pada penyelesaian program, tetapi juga meningkatkan legitimasi pemerintah desa di mata masyarakat. Dengan demikian, efektivitas menjadi salah satu indikator dengan capaian paling positif dan sudah tercapai.

5. Kemandirian

Masyarakat juga menilai bahwa perangkat desa cukup proaktif dalam menangani berbagai kebutuhan administratif maupun pelayanan sosial. Tanggung jawab yang ditunjukkan aparat desa memperlihatkan adanya semangat kerja dan loyalitas terhadap kepentingan publik. Sikap kemandirian ini menjadi modal penting bagi pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama ketika menghadapi situasi darurat atau persoalan mendesak yang membutuhkan keputusan cepat, ini menjadikan indikator kemandirian berada pada tingkat yang memadai.

Implementasi Kinerja Aparat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Olusi Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Di Desa Olusi, standar kebijakan dapat mencakup tata kelola pelayanan publik, mekanisme pengelolaan dana desa, serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Sasaran kebijakan harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan penguatan kapasitas kelembagaan desa. Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga substantif.

Apabila standar dan sasaran kebijakan tidak jelas, maka aparat desa berpotensi melakukan penyimpangan atau ketidaktepatan dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan harus berbasis pada data, aspirasi masyarakat, serta regulasi yang berlaku. Dengan adanya standar dan sasaran yang terukur, aparat desa lebih mudah mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat maupun pemerintah di tingkat kecamatan.

2. Sumber Daya

Fasilitator Di Desa Olusi, fasilitator berfungsi sebagai mitra kerja pemerintah desa, bukan sebagai pengambil keputusan. Memberikan masukan, membantu perencanaan, serta mendampingi proses pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan aturan. Peran ini sangat strategis karena sering kali aparat desa memiliki keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman dalam tata kelola pemerintahan. Dengan adanya fasilitator yang kompeten, kinerja aparat desa dapat meningkat secara signifikan. Aparat desa tidak hanya bertugas mendampingi teknis administrasi, tetapi juga menjadi penghubung antara pemerintah desa dengan masyarakat penerima manfaat. Hal ini memastikan bahwa program pembangunan benar-benar menasaskan pada kebutuhan prioritas masyarakat desa.

3. Masyarakat Penerima Manfaat

Di Desa Olusi, keberhasilan program pembangunan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif masyarakat. Misalnya dalam kegiatan pembangunan infrastruktur, gotong royong masyarakat menjadi faktor penentu keberlanjutan. Tanpa keterlibatan masyarakat, aparat desa akan kesulitan menjalankan program karena minimnya dukungan di lapangan. Partisipasi masyarakat juga penting dalam memberikan evaluasi terhadap kebijakan desa. Aspirasi, kritik, maupun masukan yang disampaikan masyarakat dapat menjadi dasar perbaikan kinerja aparat desa. Dengan demikian, masyarakat penerima manfaat berperan ganda: sebagai pengawas sosial sekaligus pendukung implementasi kebijakan desa.

4. Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan

Koordinasi antara pemerintah desa Olusi dan kecamatan sangat penting. Aparat desa harus melaporkan pelaksanaan program secara transparan kepada kecamatan, sementara kecamatan memberikan arahan serta supervisi. Hal ini bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan desa tidak menyimpang dari regulasi yang berlaku. Hubungan kerja yang baik antara pemerintah desa dan kecamatan akan memperlancar pelaksanaan program pembangunan. Jika koordinasi lemah, maka sering terjadi tumpang tindih kebijakan, keterlambatan realisasi program, bahkan potensi penyalahgunaan anggaran. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah desa dan kecamatan harus diperkuat.

5. Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial merupakan faktor krusial dalam implementasi kinerja aparat desa. Anggaran yang memadai memungkinkan pemerintah desa membiayai program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Di Indonesia, dana desa menjadi salah satu instrumen utama untuk mendukung pembangunan di tingkat desa, termasuk Desa Olusi. Namun, ketersediaan dana yang besar juga menuntut aparat desa untuk memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

6. Hubungan Antar Organisasi

Keberhasilan implementasi kebijakan di Desa Olusi juga dipengaruhi oleh hubungan antar organisasi. Aparat desa tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus menjalin sinergi dengan lembaga kemasyarakatan, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), organisasi pemuda, hingga lembaga swadaya masyarakat. Kerja sama antar organisasi memungkinkan terjadinya koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Jika hubungan antar organisasi harmonis, maka perumusan program pembangunan desa akan lebih aspiratif karena mencerminkan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat. Selain itu, koordinasi yang baik dapat

meminimalisasi konflik kepentingan, mempercepat realisasi program, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat desa.

Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik Kondisi sosial masyarakat Desa Olusi turut memengaruhi implementasi kinerja aparat desa. Tingkat pendidikan, nilai budaya, dan pola interaksi sosial masyarakat menentukan sejauh mana mereka dapat mendukung program desa. Masyarakat yang memiliki kesadaran kolektif tinggi akan lebih mudah menerima kebijakan dan berpartisipasi dalam pembangunan. Selain aspek sosial, kondisi ekonomi juga sangat menentukan. Desa dengan tingkat ekonomi rendah biasanya menghadapi tantangan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat karena warga lebih fokus pada kebutuhan dasar sehari-hari. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi membaik, maka masyarakat dapat lebih proaktif terlibat dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan.

Dinamika politik desa juga berperan penting. Konflik politik lokal, misalnya akibat perbedaan dukungan dalam pemilihan kepala desa, sering kali berdampak pada implementasi kebijakan. Jika stabilitas politik terjaga, maka aparat desa dapat bekerja lebih efektif. Oleh karena itu, menjaga harmoni sosial, memperbaiki kondisi ekonomi, dan meredam konflik politik menjadi kunci keberhasilan implementasi kinerja aparat desa.

Indikator Yang Mempengaruhi Kinerja Aparat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Olusi Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan

Secara umum, kinerja aparat Desa Olusi berada dalam kategori baik dengan beberapa catatan penting. Kualitas, kuantitas, efektivitas, dan kemandirian menunjukkan performa yang memadai sesuai harapan masyarakat. Namun demikian, indikator ketepatan waktu perlu menjadi perhatian utama karena masih terdapat hambatan dalam penyelesaian tugas secara cepat dan tepat. Hasil ini sejalan dengan teori kinerja menurut Robbins, yang menyatakan bahwa kinerja organisasi publik sangat ditentukan oleh kejelasan peran, kapabilitas personal, dan lingkungan kerja yang mendukung. Selain itu, dari sudut pandang *good governance*, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat telah mulai terlihat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kesimpulan

Pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel juga menjadi syarat utama agar pembangunan desa dapat terlaksana secara efektif. Faktor eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik desa turut memengaruhi kinerja aparat. Partisipasi aktif masyarakat, stabilitas politik lokal, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi akan memperkuat keberhasilan program pembangunan. Dengan demikian, kinerja aparat Desa Olusi dapat optimal apabila didukung standar kebijakan yang jelas, sumber daya yang memadai, serta situasi sosial-ekonomi-politik yang kondusif.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja aparat Desa Olusi Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menggunakan indikator Robbins, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja aparat desa telah terlaksana dengan cukup optimal. Indikator kualitas, kuantitas, efektivitas, dan kemandirian menunjukkan kecenderungan positif, yang menggambarkan kinerja pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat. Aparat desa telah bekerja secara teliti, mampu menyelesaikan volume pekerjaan, dan menunjukkan pemanfaatan sumber daya serta inisiatif kerja yang optimal. Namun demikian, dari

lima indikator, ketepatan waktu belum mencapai kategori optimal, sehingga diperlukan peningkatan dalam aspek ketepatan pelaksanaan tugas dan penyampaian laporan. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga teknis, hingga kendala koordinasi eksternal. Meskipun demikian, secara umum prinsip-prinsip *good governance* seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sudah mulai berjalan pada praktik penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Olusi.

Bibliografi

- Hadjon, P.M., 2008. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ilyas, Y., 1999. Kinerja (Teori, Penilaian dan Penelitian),FKM UI, Jakarta.
- Muhammad, F., 2009. Reinventing Government (Pengalaman Dari Daerah),PT. ElexMedia Komputindo, Jakarta.
- Pasolong, H., 2006. Teori Adminsitrasi Publik,CV. Alfabetta, Bandung.
- Ruky, A.S., 2002. Sistem Manajemen Kinerja,PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Salam, D.S., 2004. Manajemen Pemerintahan Indonesia,Djambatan, Jakarta.
- Syafiee, I.K., 2007. Manajemen Pemerintahan,PT. Pertja, Jakarta.
- Syafiee, I.K., 2011. Pengantar Ilmu Pemerintahan, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sugiyono., 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabetta, Bandung.